

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan publik, dan masa jabatan kepala daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2020-2024. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas keuangan terbukti memiliki pengaruh signifikan namun dengan arah hubungan negatif terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2020-2024. Menurut hasil penelitian, hubungan dengan arah negatif ini mengindikasikan bahwa proses pertanggungjawaban keuangan di pemerintah daerah Sumatera Barat masih terjebak pada formalitas administratif, dimana setiap peningkatan upaya pemenuhan akuntabilitas justru diikuti dengan penurunan skor kinerja secara statistik.
2. Pengawasan publik ditemukan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat periode 2020-2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme kontrol masyarakat sebagai prinsipal terhadap pemerintah daerah sebagai agen belum berjalan efektif, di mana partisipasi publik cenderung masih pasif dan saluran pengawasannya belum terintegrasi secara teknis dengan sistem penilaian formal. Artinya pengawasan masyarakat di Sumatera Barat belum mencapai titik kritis untuk dapat menekan birokrasi agar lebih berorientasi pada hasil pembangunan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa pengawasan publik di tingkat lokal sering kali hanya menyentuh isu-isu yang bersifat viral di media massa tetapi lemah dalam mengawasi indikator kinerja teknis seperti yang diukur dalam EKPPD, sehingga belum mampu menjadi instrumen pendorong kinerja yang signifikan bagi pemerintah daerah.

3. Berdasarkan hasil pengujian, masa jabatan kepala daerah ditemukan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat periode 2020-2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa durasi kepemimpinan bukan merupakan penentu utama capaian kinerja daerah, melainkan lebih dipengaruhi oleh mekanisme sistem birokrasi dan kompetensi kolektif yang telah terkunci dalam dokumen RPJMD. Dari perspektif *Agency Theory* tidak adanya pengaruh linear ini juga disebabkan oleh perbedaan fokus insentif kepala daerah di awal dan akhir masa jabatan, sehingga upaya peningkatan kinerja di Sumatera Barat sebaiknya lebih difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem birokrasi daripada sekadar bergantung pada stabilitas durasi kepemimpinan politik.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya dapat melihat kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini agar penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah mendapatkan hasil yang lebih maksimal di masa yang akan datang. Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mencakup kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, sehingga temuan yang dihasilkan tidak dapat langsung digeneralisasikan ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik, struktur kelembagaan, dan kapasitas fiskal yang berbeda.
2. Variabel independen yang digunakan berfokus pada akuntabilitas keuangan, pengawasan, dan masa jabatan. Faktor lainnya seperti kualitas sumber daya aparatur, kapasitas fiskal daerah, ataupun faktor politik tidak dicakup dalam model, sehingga hasil penelitian belum menggambarkan seluruh determinan potensial terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Periode observasi penelitian yang terbatas (2020–2024) menyebabkan variasi temporal yang digunakan dalam analisis panel relatif sempit. Kondisi ini dapat

mempengaruhi kemampuan model dalam menangkap dinamika kinerja pemerintah daerah secara lebih komprehensif.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Publik dan Masa Jabatan Kepala Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teruntuk Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
 - a. Berdasarkan perspektif teori keagenan, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat sebagai *agent* telah mendapatkan mandat dari masyarakat sebagai *principal*. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus meningkatkan akuntabilitas keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik. Akuntabilitas yang baik yang tercermin dari laporan keuangan yang andal serta opini audit yang lebih baik akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan kewajibannya secara optimal kepada masyarakat.
 - b. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan efektivitas pengawasan internal, terutama melalui Inspektorat Daerah. Pengawasan yang kuat tidak hanya mendeteksi kelemahan atau temuan audit, tetapi juga memberikan fungsi pencegahan (*preventive control*). Dengan memperkuat kompetensi auditor, menerapkan audit berbasis risiko, serta memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan konsistensi kinerja dan meminimalkan risiko kesalahan pengelolaan keuangan.
 - c. Pemerintah kabupaten/kota juga perlu memperhatikan aspek masa jabatan kepala daerah agar tidak hanya berorientasi pada kebijakan jangka pendek. Program pembangunan seharusnya memiliki perencanaan yang berkelanjutan sehingga perubahan kepemimpinan tidak mengganggu stabilitas kinerja daerah. Penyusunan *roadmap* kinerja jangka panjang dapat memastikan bahwa agenda strategis tetap berjalan secara konsisten.

- d. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan dan kualitas data pembangunan serta data kinerja, sehingga proses evaluasi dan perencanaan dapat dilakukan secara lebih akurat dan terukur. Penguatan sistem data ini penting untuk mendorong transparansi, mempermudah monitoring, serta mendukung perbaikan kinerja ke depan.
- e. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga pengawasan lainnya, guna memperkuat budaya akuntabilitas dan mendorong partisipasi publik yang konstruktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Teruntuk Penelitian Selanjutnya

- a. Agar gambaran hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan teruji, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jangka waktu observasi yang lebih panjang, misalnya 10 hingga 15 tahun. Rentang waktu yang lebih luas dapat memberikan variasi data yang lebih representatif sehingga hasil estimasi panel menjadi lebih stabil dan kuat.
- b. Mengingat kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh beragam faktor, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen tambahan, seperti kapasitas fiskal, kualitas sumber daya aparatur, faktor politik lokal, inovasi pelayanan publik, atau tingkat partisipasi masyarakat. Penambahan variabel ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai determinan kinerja daerah.
- c. Peneliti berikutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan metode analisis yang berbeda, seperti GMM, Random Effect dengan uji Hausman yang lebih komprehensif, atau pendekatan robust untuk mengatasi potensi endogenitas dan meningkatkan validitas hasil penelitian.
- d. Untuk meningkatkan generalisasi temuan, penelitian ke depan dapat diperluas ke provinsi lain atau seluruh wilayah di Indonesia, sehingga dapat dilakukan analisis komparatif antar daerah dengan karakteristik berbeda.